

Analisis Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal Tahun 2016

Teguh Hardi Raharjo¹⁾

¹⁾ Politeknik Trisila Dharma Tegal
E-mail: teddhymalmsteen@gmail.com

Heny Indriani²⁾

²⁾ Politeknik Trisila Dharma Tegal
E-mail: henyindriani@gmail.com

Abstract

This research aims to assess the soundness level of KSPPS BMT BUM Tegal in 2016 based on the Regulations of Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperative and SME No. 07/PerDep.6/IV/2016. The subject of this research is KSPPS BMT BUM Tegal and the object itself is the soundness level of KSPPS BMT BUM Tegal. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. In this research, the data were collected through documentation and interview methodes. The result shows that the soundness level of KSPPS BMT BUM Tegal in 2016 was in moderately soundness category with a mean score of 75,45 with the details as follows: (1) the capital aspect attained a mean score of 5,50 and was in the under surveillance category; (2) the quality of productive assets aspect attained a mean score of 14,45 and was in the moderately soundness category; (3) the management aspect attained a mean score of 11,50 and was in soundness category; (4) the efficiency aspect attained 6,50 and was in the under surveillance category; (5) the liquidity aspect attained a mean score of 12,50 and was in soundness category; (6) the identity cooperative attained a mean score of 10,00 and was in soundness category; (7) the autonomy and growth aspects attained a mean score of 5,00 and was in under special surveillance; and (8) the sharia principal persuance aspect attained a mean score of 10,00 and was in soundness category.

Keywords: *the soundness level, islamic cooperation*

PENDAHULUAN

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka pertumbuhan cukup pesat dari tahun ke tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Joelarso (2012), yang menyatakan bahwa hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Menurut Mughal

(2014), CEO *Al Huda Center of Islamic Banking and Economics*, menyampaikan bahwa angka pertumbuhan BMT pada tahun 2013 sudah mencapai lebih dari 5.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang disampaikan oleh Braman Setyo, jumlah unit usaha koperasi pada tahun 2016 mencapai 150.223 unit usaha, dimana 1,5% dari jumlah tersebut merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 253 unit dengan anggota 1,4 juta orang, modal sendiri Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 Triliun, dan volume usaha Rp 5,2 Triliun (Rahayu, 2017:365).

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, tidak berarti BMT terlepas dari berbagai masalah yang menyebabkan beberapa lembaga ini harus gulung tikar, bangkrut, tidak beroperasi, dan bahkan berhadapan dengan persoalan hukum karena *mis-management* (Hafidz, Ismanto, & Rozi, 2011:2). Wardiwiyono (2012:341) mengungkapkan terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan BMT, yaitu: (1) kurangnya persiapan SDM (pengelola) baik pengetahuan maupun keterampilan dalam mengelola BMT terutama dalam pengguliran pembiayaan, seperti: banyaknya pembiayaan tidak tertagih (pembiayaan macet) yang merupakan penyebab dominan dari gagalnya usaha BMT; dan (2) lemahnya pengawasan pengurus terhadap pengelola, terutama dalam manajemen dana, dan juga kurangnya rasa memiliki peduli pada BMT.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sakti (2013:14) pada BMT yang berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh pengurus dalam pengelolaan BMT adalah masalah permodalan (56,15%). Selain itu, kendala yang juga cukup menonjol dihadapi pengurus BMT adalah masalah kompetensi SDM (15,24%) dan persaingan (12,83%). Sementara itu, jika dilihat faktor umum yang menghambat perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi ekonomi Islam khususnya keuangan syariah menjadi faktor penghambat utama (32,11%). Selanjutnya yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber dana (18,68%), tingkat pendapatan masyarakat yang rendah (12,37%), budaya dan preferensi menabung masyarakat yang rendah (10,26%), persaingan usaha sejenis (8,95%) dan tingkat kepercayaan masyarakat pada BMT yang rendah (5,79%). Sedangkan faktor umum yang utama mendukung perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro adalah pelayanan BMT yang terjangkau bagi masyarakat (anggota), yaitu sebesar 28,73 persen. Selain itu faktor lain yang juga mendukung adalah daerah sekitar BMT yang agamis (26,24%), prosedur atau persyaratan yang mudah (22,38%), banyaknya usaha mikro-kecil (11,60%), kondisi atau budaya kekeluargaan dari masyarakat yang tinggi (5,80%) dan lembaga keuangan mikro yang masih jarang (5,25%). Khusus untuk faktor agamis, ini mendukung fakta sebelumnya dimana salah satu alasan utama mengapa masyarakat memilih produk BMT adalah karena produk BMT sesuai dengan syariah Islam.

Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukannya penilaian tingkat kesehatan koperasi secara periodik dan berkala. Penilaian tingkat kesehatan koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota maupun non anggota koperasi dan pengelola. Menurut Sudarwanto (2013:247), penilaian kesehatan koperasi merupakan salah satu instrumen pengendali dari salah urus atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal koperasi.

KSPPS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal merupakan BMT pertama di kota Tegal yang berdiri tepatnya tanggal 22 September 1997. KSPPS BMT BUM Tegal telah memiliki 3 cabang yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Tegal. Perkembangan organisasi KSPPS BMT BUM Tegal mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah anggota yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah anggota pada tahun 2014 sebanyak 5.096 orang, kemudian meningkat menjadi 7.010 orang pada tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 8.458 orang pada tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Hasil Usaha, pendapatan kotor KSPPS BMT BUM Tegal selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Namun, peningkatan pendapatan kotor tersebut selalu diimbangi dengan peningkatan biaya operasional yang jumlahnya cukup seimbang. Jika dirasioikan, KSPPS BMT BUM Tegal hanya mendapatkan pendapatan bersih sebesar 3,65% pada tahun 2016. Padahal dengan biaya operasional yang ada menurut Kementerian Koperasi seharusnya sebuah KJKS (sekarang bernama KSPPS) mampu mendapatkan pendapatan sebesar lebih dari 147% (Kementerian Koperasi, 2007:25).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh KSPPS BMT BUM Tegal adalah masih tingginya jumlah pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Laporan Rekap Pembiayaan Bermasalah selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan macet memiliki porsi terbesar pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUM Tegal, terutama pada tahun 2016 yaitu sebesar 60,47%.

KSPPS BMT BUM sendiri telah melakukan penilaian kesehatan koperasi secara internal. Berdasarkan hasil penilaian internal tersebut, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal selama tiga tahun terakhir konsisten berada dalam kategori cukup sehat. Namun, penilaian yang dilakukan pada tahun 2016 masih menggunakan pedoman yang lama, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Padahal mulai tahun 2016, penilaian kesehatan KSPPS berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kondisi kesehatan KSPPS BMT BUM pada Tahun 2016. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah “Analisis Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal Tahun 2016”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukmana dan Mulyati (2015) dengan judul “Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KJKS BMT Binamas pada tahun 2012 berada dalam kategori Cukup Sehat dengan skor 76,17. Pada tahun 2013 total skor konstan 76,17 dengan predikat yang sama, yaitu dalam kategori Cukup Sehat. Sedangkan pada tahun 2014, total skor sedikit mengalami penurunan menjadi 77,20 dengan predikat Cukup Sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2016) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KJKS Al Munawarah meraih predikat tingkat kesehatan Cukup Sehat dengan skor 73,65.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan KSPS KIM Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPS KIM meraih predikat tingkat kesehatan Cukup Sehat dengan skor 71,43. Dimana, aspek permodalan, manajemen, efisiensi, jatidiri, kemandirian dan pertumbuhan dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Aspek kualitas aktiva produktif dan kepatuhan prinsip syariah dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Sedangkan, aspek likuiditas dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif karena dalam penelitian ini hanya menganalisis variabel mandiri dan tidak dihubungkan atau membandingkan dengan variabel lain. Seperti yang diungkapkan oleh Arikunto (2010:36), bahwa penelitian evaluatif merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk membandingkan dengan kriteria-kriteria, kemudian diambil suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan yang kemudian ditabulasikan untuk menentukan kategori KSPS BMT BUM Tegal termasuk dalam predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), khususnya laporan keuangan KSPS BMT BUM pada tahun 2016. Sedangkan, data primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS BMT BUM dari aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSPS BMT BUM dari aspek manajemen dan kepatuhan prinsip syariah. Selain itu, teknik wawancara juga digunakan untuk mendukung data yang terkumpul melalui teknik dokumentasi, sehingga data yang didapat lebih objektif dan valid. Sedangkan, Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada KSPS BMT BUM Tegal.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Cakupan penilaian kesehatan meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan, serta kepatuhan prinsip syariah. Skor secara keseluruhan berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek tersebut digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPS yang dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

HASIL DAN ANALISIS

Hasil

1. Aspek Permodalan

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek permodalan terdiri dari: (1) rasio modal sendiri terhadap total aset dan (2) rasio kecukupan modal (*CAR*). Berdasarkan hasil perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset diperoleh nilai rasio sebesar 2,45% dan mendapatkan skor 0,5, sehingga masuk dalam kriteria Tidak Sehat. Sedangkan, hasil perhitungan rasio kecukupan modal (*CAR*) diperoleh nilai rasio sebesar 9,28% dan mendapatkan skor 5, sehingga masuk dalam kriteria Sehat.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari: (1) rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan; (2) rasio portofolio pembiayaan berisiko; dan (3) rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (*PPAP*). Berdasarkan hasil perhitungan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan diperoleh nilai rasio sebesar 7,23% dan mendapatkan skor 7,5, sehingga masuk dalam kriteria Cukup Lancar. Hasil perhitungan rasio portofolio pembiayaan berisiko diperoleh nilai rasio sebesar 7,23% dan mendapatkan skor 5, sehingga masuk dalam kriteria Tidak Berisiko. Sedangkan, hasil perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (*PPAP*) diperoleh nilai rasio sebesar 39,50% dan mendapatkan skor 1,95, sehingga masuk dalam kriteria Diragukan.

3. Aspek Manajemen

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek manajemen terdiri dari: (1) manajemen umum; (2) kelembagaan; (3) manajemen permodalan; (4) manajemen aktiva; dan (5) manajemen likuiditas. Berdasarkan hasil pemantauan di KSPPS BMT BUM Tegal melalui metode wawancara dengan disertai pengumpulan bukti-bukti pendukung yang diperlukan, diperoleh hasil bahwa manajemen umum mendapatkan skor 3,00 atas 12 pertanyaan bernilai positif, sehingga masuk dalam kriteria Baik. Selanjutnya, penilaian aspek kelembagaan mendapatkan skor 2,5 atas 5 pertanyaan bernilai positif dari total pertanyaan berjumlah 6, sehingga masuk dalam kriteria Baik. Penilaian aspek manajemen permodalan mendapatkan skor 1,8 atas 3 pertanyaan bernilai positif dari total pertanyaan berjumlah 5, sehingga masuk dalam kriteria Cukup Baik. Penilaian aspek manajemen aktiva mendapatkan skor 1,8 atas 6 pertanyaan bernilai positif dari total pertanyaan berjumlah 10, sehingga masuk dalam kriteria Cukup Baik. Terakhir, penilaian aspek manajemen likuiditas mendapatkan skor 2,4 atas 4 pertanyaan bernilai positif dari total pertanyaan berjumlah 5, sehingga masuk dalam kriteria Baik.

4. Aspek Efisiensi

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek efisiensi terdiri dari: (1) rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto; (2) rasio aktiva tetap terhadap total aset; dan (3) rasio efisiensi pelayanan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto diperoleh nilai rasio sebesar 99,75% dan mendapatkan skor 2, sehingga masuk dalam kriteria Kurang Efisien. Hasil perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset diperoleh nilai rasio sebesar 11,84% dan mendapatkan skor 4, sehingga masuk dalam kriteria Baik. Sedangkan, hasil perhitungan efisiensi pelayanan diperoleh nilai rasio sebesar 6,87% dan mendapatkan skor 0,5, sehingga masuk dalam kriteria Tidak Baik.

5. Aspek Likuiditas

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek likuiditas terdiri dari: (1) rasio kas dan (2) rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kas diperoleh nilai rasio sebesar 28,95% dan mendapatkan skor 10, sehingga masuk dalam kriteria Liquid. Sedangkan, hasil perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima diperoleh nilai rasio sebesar 63,14% dan mendapatkan skor 2,5, sehingga masuk dalam kriteria Kurang Liquid.

6. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek jatidiri koperasi terdiri dari: (1) rasio partisipasi bruto dan (2) rasio promosi ekonomi anggota. Berdasarkan hasil perhitungan rasio partisipasi bruto diperoleh nilai rasio sebesar 100% dan mendapatkan skor 5, sehingga masuk dalam Tinggi. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya transaksi non anggota yang berkontribusi dalam jumlah partisipasi bruto di KSPPS BMT BUM Tegal. Sedangkan, hasil perhitungan rasio promosi ekonomi anggota diperoleh nilai rasio sebesar 162,59% dan mendapatkan skor 5, sehingga masuk dalam kriteria Bermanfaat.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian tingkat kesehatan KSPPS berdasarkan aspek kemandirian dan pertumbuhan terdiri dari: (1) rentabilitas aset; (2) rentabilitas ekuitas; dan (3) kemandirian operasional pelayanan. Berdasarkan hasil perhitungan rentabilitas aset diperoleh nilai rasio sebesar 0,66% dan mendapatkan skor 0,75, sehingga masuk dalam kriteria Rendah. Hasil perhitungan rentabilitas ekuitas diperoleh nilai rasio sebesar 8,46% dan mendapatkan skor 2,25, sehingga masuk dalam kriteria Cukup. Sedangkan, hasil perhitungan kemandirian operasional pelayanan diperoleh nilai rasio sebesar 100,25% dan mendapatkan skor 2, sehingga masuk dalam kriteria Kurang.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil pemantauan di KSPPS BMT BUM Tegal melalui metode wawancara dengan disertai pengumpulan bukti-bukti pendukung yang diperlukan, diperoleh hasil bahwa aspek kepatuhan prinsip syariah mendapatkan nilai kredit 10 atas 10 pertanyaan bernilai positif, sehingga masuk dalam kriteria Patuh.

9. Penetapan Kesehatan

Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan terhadap 8 (delapan) aspek tingkat kesehatan KSPPS, diperoleh skor secara keseluruhan yaitu sebesar 75,45. Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, skor tersebut menetapkan predikat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal pada kriteria Cukup Sehat. Rekapitulasi penilaian Kesehatan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Kesehatan

No	Aspek yang Dinilai	Skor	Kriteria
1	Permodalan	5,5	
1.1	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	0,5	Tidak Sehat
1.2	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	5	Sehat
2	Kualitas Aktiva Produktif	14,45	
2.1	Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan	7,5	Cukup Lancar
2.2	Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	5	Tidak Berisiko
2.3	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	1,95	Diragukan
3	Manajemen	11,50	
3.1	Manajemen Umum	3	Baik
3.2	Manajemen Kelembagaan	2,5	Baik
3.3	Manajemen Permodalan	1,8	Cukup Baik
3.4	Manajemen Aktiva	1,8	Cukup Baik
3.5	Manajemen Likuiditas	2,4	Baik
4	Efisiensi	6,5	
4.1	Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto	2	Kurang Efisien
4.2	Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset	4	Baik
4.3	Rasio Efisiensi Pelayanan	0,5	Tidak Baik
5	Likuiditas	12,5	
5.1	<i>Cash Ratio</i>	10	Liquid
5.2	Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima	2,5	Kurang Liquid
6	Jatidiri Koperasi	10	
6.1	Rasio Partisipasi Bruto	5	Tinggi
6.2	Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	5	Bermanfaat
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	5	
7.1	Rentabilitas Aset	0,75	Rendah
7.2	Rentabilitas Ekuitas	2,25	Cukup
7.3	Kemandirian Operasional Pelayanan	2	Kurang
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	10	
8.1	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	Patuh
Skor Akhir			75,45
Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi			Cukup Sehat

Sumber: Data Sekunder (Diolah)

Pembahasan

1. Aspek Permodalan

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek permodalan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 5,50, dimana skor maksimal pada aspek ini adalah sebesar 10. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Dalam Pengawasan. Skor tersebut didasarkan pada rasio modal sendiri terhadap total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total aset KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 2,45%, sehingga mendapat nilai kredit 10 dengan skor 0,5. Skor tersebut menetapkan aspek permodalan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Tidak Sehat berdasarkan rasio ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Tyas (2014) dan Dewi (2015) yang memperoleh hasil bahwa rasio modal sendiri terhadap total aset mendapatkan skor terendah. Rendahnya skor pada rasio ini disebabkan masih rendahnya jumlah modal sendiri yang dihimpun dibandingkan total aset yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUM Tegal. Jika diperhatikan pada laporan neraca keuangan, total modal yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 paling besar berasal dari modal penyertaan yaitu 72,76%, sedangkan modal sendiri hanya memiliki kontribusi 22,48%, dengan rincian simpanan pokok 2,19%, simpanan wajib 8,92%, simpanan khusus 1,84%, sumbangan 3,93%, dan cadangan umum 5,61%, sedangkan 4,75% berasal dari laba berjalan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen KSPPS BMT BUM Tegal dalam meningkatkan modal sendiri adalah meningkatkan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus bagi anggota. Simpanan pokok KSPPS BMT BUM Tegal saat ini hanya Rp 10.000 dan simpanan wajib hanya Rp 5.000 per bulan. Menerbitkan produk simpanan khusus yang lebih menarik juga dapat dilakukan sebagai upaya penguatan modal sendiri. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan cadangan umum. Saat ini, cadangan umum hanya mendapat alokasi 20% dari total SHU yang dibagikan. Menurut Budiwati (2009:7) koperasi yang belum memiliki modal yang kuat biasanya mengalokasikan SHU yang dibagikan sebesar 50%-75% untuk dana cadangan, sedangkan bagi koperasi yang permodalannya sudah kuat dan mapan biasanya mengalokasikan sekitar 20%-30% SHU yang dibagikan untuk dana cadangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa KSPPS BMT BUM Tegal belum memiliki modal yang kuat.

Rasio kecukupan modal (*CAR*) KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 9,28%, sehingga mendapat nilai kredit 100 dengan skor 5. Skor tersebut menetapkan aspek permodalan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Sehat berdasarkan rasio ini. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini, dimana disebutkan bahwa sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai *CAR* mencapai 8% atau lebih. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Sukmana dan Mulyati (2015), Yusuf (2016), dan Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio kecukupan modal (*CAR*) memiliki kriteria Sehat. Nilai rasio ini memiliki arti bahwa Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (*ATMR*) dijamin oleh modal sendiri dan modal pelengkap sebesar 9,28%. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal hendaknya mempertahankan kondisi ini dengan terus melakukan pengembangan usaha yang sehat dan mengelola modal yang ada agar dapat mengantisipasi atau menanggung risiko kerugian dalam batasan tertentu.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek kualitas aktiva produktif KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 14,45, dimana skor maksimal pada aspek ini adalah sebesar 20. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Cukup Sehat. Skor tersebut didasarkan pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan berisiko, penyisihan penghapusan aktiva produktif (*PPAP*).

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 7,23%, sehingga mendapat

nilai kredit 75 dengan skor 7,5. Skor tersebut menetapkan aspek kualitas aktiva produktif KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Cukup Lancar berdasarkan rasio ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Yusuf (2016) dan Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan memiliki kriteria Cukup Lancar. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal perlu melakukan upaya untuk lebih meminimalisir jumlah pembiayaan bermasalah, terutama dalam hal penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan macet yang saat ini memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 62,18% dari total pembiayaan dan piutang bermasalah. Upaya yang dilakukan manajemen KSPPS BMT BUM Tegal dalam rangka membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya dapat dilakukan dengan mengadopsi pedoman Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/18/PBI/2004 yang berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Rasio portofolio pembiayaan berisiko KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 7,23%, sehingga mendapat nilai kredit 100 dengan skor 5. Skor tersebut menetapkan aspek permodalan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Tidak Berisiko berdasarkan rasio portofolio pembiayaan berisiko. Rasio ini memiliki nilai yang sama dengan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, yaitu 7,23%. Hal ini disebabkan pembiayaan di KSPPS BMT BUM Tegal seluruhnya merupakan akad dengan pembayaran bulanan. Hendaknya manajemen KSPPS BMT BUM Tegal dapat mempertahankan kondisi ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Sukamana dan Mulyati (2015) yang memperoleh hasil bahwa rasio portofolio pembiayaan berisiko memiliki kriteria Tidak Berisiko.

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 39,50%, sehingga mendapat nilai kredit 39 dengan skor 1,95. Skor tersebut menetapkan aspek permodalan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Diragukan berdasarkan rasio ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Sukamana dan Mulyati (2015) yang memperoleh hasil bahwa rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) memiliki kriteria diragukan. Berdasarkan penelusuran dokumentasi dan wawancara dengan pengurus, peneliti tidak menemukan daftar agunan dari setiap pembiayaan kepada nasabah ataupun anggota KSPPS BMT BUM Tegal. Sehingga dalam perhitungan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAWD), jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah untuk setiap jenis kolektibilitasnya tidak dikurangkan dengan nilai agunan atau 50% dari baki debit. Upaya yang perlu dilakukan oleh Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal untuk memperbaiki ataupun meningkatkan rasio ini adalah membuat peraturan yang lebih tegas dan persyaratan lebih jelas untuk nasabah ataupun anggota yang mengajukan pinjaman dengan disertai agunan yang memadai. Manajemen seharusnya melakukan pencatatan pembiayaan yang lebih baik dengan menyertakan agunan atas pembiayaan nasabah ataupun anggota yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000 dan/ atau pencatatan baki debit untuk mengantisipasi agunan yang nilai jaminannya tidak dapat ditaksir/ diketahui. Upaya lain yang perlu dilakukan oleh manajemen KSPPS BMT BUM Tegal adalah menyesuaikan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*Not Performing Finance*) dengan persentase tertentu. Semakin besar aktiva produktif bermasalah, maka semakin besar PPAP. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Komalasari, Fauziah, dan Setiyawan (2015) yang memperoleh hasil bahwa keberhasilan manajemen BMT Mitra Kota Cimahi dalam

menekan angka pembiayaan bermasalah yaitu melalui pelaksanaan PPAP. Kondisi yang terjadi di KSPPS BMT BUM Tegal pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori tersebut. Berdasarkan laporan neraca keuangan menunjukkan bahwa PPAP pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 24,67% dibandingkan pada tahun 2015, padahal pembiayaan bermasalah pada tahun 2016 meningkat 11,59% dibandingkan pada tahun 2015 atau dari Rp 1.397.740.066,12 menjadi Rp 1.599.752.909,14. Selain itu, peneliti juga menyarankan kebijakan pembentukan PPAP disesuaikan dengan BAB V Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Aspek Manajemen

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek manajemen KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 11,50, dimana skor maksimal pada aspek ini adalah sebesar 15. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Sehat. Skor tersebut diperoleh dari komponen manajemen umum yang memperoleh skor 3 dengan kriteria Baik, manajemen kelembagaan memperoleh skor 2,50 dengan kriteria Baik, manajemen permodalan memperoleh skor 1,80 dengan kriteria Cukup Baik, manajemen aktiva memperoleh skor 1,80 dengan kriteria Cukup Baik, dan manajemen likuiditas yang memperoleh skor 2,40 dengan kriteria Baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yusuf (2016) yang memperoleh hasil bahwa manajemen umum mendapatkan skor paling maksimal dibandingkan komponen manajemen yang lain dengan seluruh pertanyaan mendapatkan hasil positif. KSPPS BMT BUM Tegal harus dapat mempertahankan komponen manajemen umum yang sudah dalam kondisi baik.

Hal yang perlu diperbaiki pada komponen manajemen kelembagaan adalah melakukan restrukturisasi organisasi agar tidak terjadi perangkapan jabatan seperti yang terjadi pada tahun 2016, di mana masih terjadi beberapa perangkapan jabatan, diantaranya: (1) Ketua Pengawas merangkap Direktur; (2) Ketua Pengurus merangkap Wakil Direktur 1; (3) Sekretaris Pengurus merangkap Manajer Divisi HRD; (4) Bendahara Pengurus merangkap Manajer Divisi Keuangan; dan (5) Wakil Direktur 2 merangkap Manajer Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI). Hal yang perlu diperbaiki pada komponen manajemen permodalan adalah penguatan terhadap modal sendiri. Tingkat permodalan sendiri (11,12%) yang terjadi pada tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan aset (13,86%). Modal sendiri yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 juga tidak cukup untuk membiayai investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran. Beberapa hal yang perlu diperbaiki pada komponen manajemen aktiva, diantaranya adalah: (1) menyertakan daftar agunan pada laporan pembiayaan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan Rp 1.000.000; (2) mengalokasikan dana cadangan penghapusan pembiayaan yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan; (3) memaksimalkan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan macet agar dapat tertagih (minimal sepertiga pada tahun berikutnya) dan/atau membuat laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan biaya; dan (4) melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan pembiayaan yang disertai dengan dokumen pengikatan dan/ atau penyerahan agunan. Hal yang masih perlu diperhatikan pada komponen manajemen likuiditas adalah perlu adanya kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain untuk memfasilitasi pembiayaan sehingga dapat menjaga likuiditas koperasi, tidak hanya mengandalkan dana eksternal

dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

4. Aspek Efisiensi

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek efisiensi KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 6,5, dimana skor maksimal pada aspek ini adalah sebesar 10. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat dalam pengawasan. Skor tersebut didasarkan pada rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset dan rasio efisiensi pelayanan.

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 99,75%, sehingga mendapat nilai kredit 50 dengan skor 2. Skor tersebut menetapkan aspek efisiensi KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Kurang Efisien berdasarkan rasio ini. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi biaya yang telah dilaksanakan dan menyusun manajemen strategi efisiensi biaya yang lebih baik, sehingga besarnya jumlah partisipasi bruto tidak selalu diimbangi dengan jumlah biaya operasional yang tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Sukmana dan Mulyati (2015) yang memperoleh hasil bahwa rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki kriteria Kurang Efisien. Beberapa permasalahan yang terdapat pada penerapan kebijakan efisiensi biaya pada suatu koperasi adalah jumlah volume usaha yang besar, wilayah pelayanan yang luas dan menyebar, komposisi yang tidak seimbang, penentu kebijakan yang tidak paham tentang kondisi ekonomi, sistem pengelolaan yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan kondisi politik, serta ekonomi dan lingkungan eksternal koperasi yang tidak mendukung (Hidayanti dan Suranta, 2016: 40). Manajemen strategi yang dapat diterapkan KSPPS BMT BUM Tegal untuk dapat mengelola biaya operasional sehingga mendapat nilai skor efisien adalah dengan: (1) Menyusun anggaran yang akurat; (2) Pengawasan yang ketat; (3) Memilah biaya menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap serta dilaksanakan dengan tepat, sedangkan biaya tidak tetap ditekan pengeluarannya menjadi efisien. Dalam manajemen biaya harus memegang prinsip berimbang antara biaya dan pendapatan (Yusuf, 2016: 108).

Rasio aktiva tetap terhadap total aset KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 11,84%, sehingga mendapat nilai kredit 100 dengan skor 4. Skor tersebut menetapkan aspek efisiensi KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Baik berdasarkan rasio ini. Artinya, penggunaan aset yang dimiliki koperasi sudah efisien dalam membelanjakan aktiva tetapnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Yusuf (2016) dan Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio aktiva tetap terhadap total aset memiliki kriteria Baik. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus dapat mempertahankan kondisi ini.

Rasio efisiensi pelayanan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 6,87%, sehingga mendapat nilai kredit 25 dengan skor 0,5. Skor tersebut menetapkan aspek efisiensi KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Tidak Baik berdasarkan rasio ini. Artinya, besarnya jumlah piutang dan pembiayaan tidak seimbang terhadap jumlah biaya gaji dan honor karyawan. Idealnya jumlah biaya gaji dan honor karyawan memiliki besaran yang kurang lebih sama dengan jumlah piutang dan pembiayaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa KSPPS BMT BUM Tegal tidak efisien dalam mengoptimalkan karyawannya dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan. Jumlah mitra pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT BUM Tegal pada tahun 2016 adalah 2.463 orang, sedangkan jumlah karyawan yang

dimiliki adalah 44 orang. Artinya, 1 orang karyawan melayani 55,98 mitra pembiayaan. Sehingga, perlu kiranya KSPPS BMT BUM Tegal menyeimbangkan jumlah biaya gaji dan honor karyawan terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio efisiensi pelayanan memiliki kriteria Tidak Baik.

5. Aspek Likuiditas

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek likuiditas KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 12,5, di mana skor maksimal pada aspek ini adalah sebesar 15. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Sehat. Skor tersebut didasarkan pada rasio kas (*cash ratio*) dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Rasio kas BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 28,95%, sehingga mendapat nilai kredit 100 dengan skor 10. Skor tersebut menetapkan aspek likuiditas KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Liquid berdasarkan rasio kas. Artinya, KSPPS sudah optimal dan mencukupi persediaan kas untuk mengantisipasi pengambilan simpanan oleh anggota, sehingga secara teoritis, KSPPS sudah memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus mempertahankan kondisi yang sudah baik ini dan terus meningkatkan rasio kas melalui kebijakan manajemen kas yang liquid dengan mengatur jadwal dan tingkat kebutuhan realisasi pembiayaan sesuai kondisi kas yang tersedia. Perusahaan yang mengalami peningkatan *cash flow liquidity ratio* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan kewajiban lancarnya, namun sebaliknya, perusahaan akan bermasalah atau harus menerapkan alternatif strategi dalam mengatasi berbagai hal yang menyangkut kebutuhan jangka pendeknya jika arus kas mengalami penurunan (Fahmi, 2011: 126).

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 63,14%, sehingga mendapat nilai kredit 50 dengan skor 2,5. Skor tersebut menetapkan aspek likuiditas KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kategori Kurang Liquid berdasarkan rasio ini. Artinya, KSPPS belum optimal dalam memanfaatkan dana yang diterima untuk pembiayaan produktif. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima memiliki kriteria kurang liquid. Penilaian ini dalam perbankan dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk perbankan syariah, yakni menilai kemampuan KSPPS dalam mengoptimalkan dana yang diterima untuk pembiayaan produktifnya. KSPPS dikategorikan liquid, jika menggunakan lebih dari total hutangnya (artinya menggunakan modal juga) untuk pembiayaan produktifnya. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana yang diterima untuk pembiayaan produktifnya melalui kebijakan pembiayaan mayoritas untuk waktu jangka pendek dan mempunyai nilai produktif, sehingga dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.

6. Aspek Jatidiri Koperasi

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek jatidiri KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 10 maksimal. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Sehat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jatidiri KSPPS sudah sangat baik dan berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu

mempromosikan ekonomi anggotanya. Skor tersebut didasarkan pada rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

Rasio partisipasi bruto KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 100%, sehingga mendapat nilai kredit 100 dengan skor 5. Skor tersebut menetapkan aspek jatidiri KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Tinggi berdasarkan rasio partisipasi bruto. Nilai rasio yang tinggi tersebut terjadi karena tidak adanya transaksi non-anggota, sehingga setiap mitra KSPPS harus terdaftar terlebih dahulu menjadi anggota. Artinya, kemampuan KSPPS dalam melayani anggotanya sudah sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah keanggotaan (20,66%) yang disertai dengan peningkatan partisipasi (10,40%) pada tahun 2016 dibandingkan jumlah anggota dan partisipasi bruto pada tahun 2015. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Sukmana dan Mulyati (2015), Yusuf (2016), dan Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio partisipasi bruto memiliki kriteria Tinggi.

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 162,59%, sehingga mendapat nilai kredit 100 dengan skor 5. Skor tersebut menetapkan aspek jatidiri KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Bermanfaat berdasarkan rasio ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan dengan penelitian Sukmana dan Mulyati (2015) dan Rahayu (2017) yang memperoleh hasil bahwa rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) memiliki kriteria bermanfaat. KSPPS BMT BUM Tegal pada tahun 2016 dapat dikatakan sudah mampu memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi terhadap total simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Temuan ini sesuai dengan teori Hendar & Kusnadi (2005: 92-93) yang menyatakan bahwa para anggota akan terus mempertahankan keanggotaannya dan terus mengadakan transaksi dengan koperasi apabila mereka memperoleh manfaat, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, yaitu memperoleh barang dan jasa yang harganya, mutu, dan syarat-syaratnya lebih menguntungkan dibandingkan jika diperoleh dari pihak lain yang bukan koperasi.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor 5, dimana skor maksimal pada aspek ini adalah sebesar 10. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Dalam Pengawasan Khusus. Skor tersebut didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional pelayanan.

Rentabilitas aset KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 0,66%, sehingga mendapat nilai kredit 25 dengan skor 0,75. Skor tersebut menetapkan aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Rendah berdasarkan rentabilitas aset. Artinya, kemampuan KSPPS dalam mengelola total aset untuk menghasilkan laba kotor masih rendah atau belum maksimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Tyas (2014), Sukmana dan Mulyati (2015), Dewi (2016), dan Yusuf (2016) dimana skor rentabilitas aset koperasi masih rendah. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus berupaya untuk meningkatkan rentabilitas ekonominya dengan cara memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan. Cara lain yang dapat diterapkan oleh KSPPS untuk meningkatkan rentabilitas aset adalah: (1) Mengurangi ketergantungan modal dari luar berupa pinjaman yang memberatkan; (2) Menggali sumber-sumber modal anggota, terutama untuk penyertaan dan investasi dari kalangan anggota; (3) Memantapkan peluang pasar sebagai konsumen KSPPS; dan (4) Selalu fokus sesuai karakter dan

bentuk usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang selalu memenuhi kepentingan anggota (Yusuf, 2016: 109).

Rentabilitas ekuitas KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 8,46%, sehingga mendapat nilai kredit 75 dengan skor 2,25. Skor tersebut menetapkan aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Cukup berdasarkan rentabilitas ekuitas. Artinya, kemampuan manajemen KSPPS dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih sudah cukup optimal. KSPPS harus mampu meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan dan jasa anggota, serta menekan pengajuan pinjaman kepada pihak ketiga, sehingga dapat mengurangi biaya bunga yang dapat menyebabkan pemborosan biaya operasional.

Kemandirian operasional pelayanan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 adalah 100,25%, sehingga mendapat nilai kredit 50 dengan skor 2. Skor tersebut menetapkan aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 berada pada kriteria Kurang berdasarkan kemandirian operasional pelayanan KSPPS. Artinya, beban usaha dan beban perkoperasian yang dikeluarkan kurang efisien dibandingkan dengan pendapatan usaha yang tinggi, sehingga diperoleh kualitas yang kurang maksimal. Pendapatan usaha yang tinggi disertai dengan biaya operasional yang tinggi pula. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal perlu melakukan efisiensi biaya operasional pelayanan agar dapat meningkatkan kemandirian operasional pelayanan. Temuan ini sejalan dengan hasil Sukmana dan Mulyati (2015) di mana skor kemandirian operasional pelayanan masih rendah.

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa aspek kepatuhan prinsip syariah KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 mendapatkan skor maksimal, yaitu 10 dengan kriteria Patuh. Sehingga, dikategorikan ke dalam predikat Sehat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh produk pembiayaan dan penghimpunan, laporan keuangan, serta produk, operasional KSPPS BMT BUM Tegal, secara umum, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan prinsip syariah.

Hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen KSPPS BMT BUM Tegal untuk mempertahankan ataupun lebih meningkatkan kondisi yang baik ini adalah (1) melakukan penyempurnaan dari sisi SOP setiap pembiayaan, di mana setiap akad dibuat tata langkahnya dan perlu adanya pengawas internal cabang (PIC) yang menjaga kepatuhan atas pelaksanaan SOP tersebut. PIC yang dimaksud seperti tugas Audit Internal/Biro Kepatuhan Syariah yang sehari-hari beraktifitas di dalam kantor; (2) Penguatan kemampuan para pengelola, khususnya terkait peningkatan penguasaan ekonomi syariah yang paling dasar dan perlu program *upgrading* dari sisi ini yang terukur, dapat dievaluasi dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; serta (3) Meningkatkan dakwah dan pemahaman ekonomi dan transaksi syariah di tengah masyarakat, agar semangat menjalankan akad syariah bukan hanya dari pihak KSPPS BMT BUM Tegal saja, namun juga masyarakat selaku anggota.

9. Penilaian Kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal Tahun 2016

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap 8 (delapan) aspek tingkat kesehatan KSPPS, diperoleh skor secara keseluruhan yaitu sebesar 75,45. Sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, skor tersebut menetapkan predikat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal pada kriteria Cukup Sehat.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan pengurus dan pengelola, peneliti tidak menemukan faktor-faktor yang dapat mengurangi tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal. Hasil elaborasi tersebut ditemukan kesimpulan seperti berikut: (1) Tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun eksteren oleh pihak KSPPS; (2) Pembukuan yang dilakukan oleh pihak KSPPS tidak pernah tertunda dari waktu yang telah ditentukan; (3) Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan; (4) Penyampaian laporan tahunan atau laporan berkala KSPPS dilakukan secara konsisten dan tepat waktu; (5) Laporan keuangan KSPPS telah diaudit oleh akuntan publik Tarmizi Achmad dengan nomor izin usaha: kep.091/km.6/2004. Hal tersebut dilakukan karena volume pembiayaan KSPPS BMT BUM Tegal pada tahun 2016 melebihi Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); (6) Setiap manajer diberikan wewenang penuh untuk mengelola aktivitas usaha KSPPS; (7) Belum pernah terjadi perselisihan intern yang menimbulkan kesulitan dalam usaha koperasi, karena pengurus dan pengelola KSPPS memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan, salah satunya adalah adanya program pendampingan oleh lembaga konsultan manajemen koperasi “Assist Manajemen”; (8) Tidak ada campur tangan pihak luar KSPPS yang tidak wajar terhadap jalannya usaha, sehingga prinsip koperasi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah; (9) Tidak ditemukan rekayasa atau *window dressing* dalam pembukuan KSPPS yang mengakibatkan kekliruan dalam penilaian terhadap KSPPS; dan (10) Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan tercatat dalam pembukuan KSPPS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan, pengamatan dokumentasi, dan wawancara terstruktur yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 secara parsial dan simultan adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek permodalan, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Dalam Pengawasan dengan skor 5,50, di mana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut didasarkan pada rasio modal sendiri terhadap total aset yang mendapatkan skor 0,50 dengan kriteria Tidak Sehat dan rasio modal kecukupan modal (*CAR*) yang mendapatkan skor 5,00 dengan kriteria Sehat.
2. Dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Cukup Sehat dengan skor 14,45, dimana skor maksimalnya adalah 20. Skor tersebut didasarkan pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang mendapatkan skor 7,50 dengan kriteria Cukup Lancar, rasio portofolio pembiayaan berisiko yang mendapatkan skor 5,00 dengan kriteria Tidak Berisiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (*PPAP*) yang mendapatkan skor 1,95 dengan kriteria Diragukan.
3. Dilihat dari aspek manajemen, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Sehat dengan skor 11,50, di mana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut didasarkan pada komponen manajemen umum yang mendapatkan skor 3 dengan kriteria Baik, komponen manajemen

kelembagaan yang mendapatkan skor 2,50 dengan kriteria Baik, komponen manajemen permodalan dan manajemen aktiva yang masing-masing mendapatkan skor 1,80 dengan kriteria Cukup Baik, dan manajemen likuiditas yang mendapatkan skor 2,40 dengan kriteria Baik.

4. Dilihat dari aspek efisiensi, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Dalam Pengawasan dengan skor 6,50, di mana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut didasarkan pada rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto yang mendapatkan skor 2,00 dengan kriteria Kurang Efisien, rasio aktiva tetap terhadap total aset yang mendapatkan skor 4,00 dengan kriteria Baik, dan rasio efisiensi pelayanan yang mendapatkan skor 0,50 dengan kriteria Tidak Baik.
5. Dilihat dari aspek likuiditas, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Sehat dengan skor 12,50, di mana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut didasarkan pada rasio kas (*cash ratio*) yang mendapatkan skor 10 dengan kriteria Liquid dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima yang mendapatkan skor 2,50 dengan kriteria Kurang Liquid.
6. Dilihat dari aspek jati diri koperasi, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Sehat dengan skor maksimal yaitu 10. Skor tersebut didasarkan pada partisipasi bruto yang mendapatkan skor 5,00 dengan kriteria Tinggi dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA) yang mendapatkan skor 5,00 dengan kriteria Kurang Bermanfaat.
7. Dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Dalam Pengawasan Khusus dengan skor 5,00, dimana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut didasarkan pada rentabilitas aset yang mendapatkan skor 0,75 dengan kriteria Rendah, rentabilitas ekuitas yang mendapatkan skor 2,25 dengan kriteria Cukup, dan kemandirian operasional pelayanan yang mendapatkan skor 2 dengan kriteria Kurang.
8. Dilihat dari aspek kepatuhan prinsip syariah, tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 dikategorikan ke dalam predikat Sehat dengan skor maksimal yaitu 10.
9. Berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016 secara simultan diperoleh skor sebesar 75,45, sehingga dikategorikan ke dalam predikat Cukup Sehat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan KSPPS BMT BUM Tegal tahun 2016, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus dapat memperkuat modal sendiri agar dapat meningkatkan aspek permodalan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah: (1) meningkatkan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus anggota; (2) menerbitkan produk simpanan khusus yang lebih menarik; dan (3) meningkatkan alokasi pembagian SHU untuk cadangan umum.
2. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal perlu melakukan upaya untuk lebih meminimalisir jumlah pembiayaan bermasalah, terutama dalam hal penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan macet melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan

restructuring. Manajemen juga perlu membuat peraturan yang lebih tegas dan persyaratan lebih jelas untuk nasabah ataupun anggota yang mengajukan pinjaman dengan disertai agunan yang memadai. Kebijakan pembentukan PPAP juga perlu disesuaikan dengan BAB V Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Upaya yang perlu dilakukan Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan aspek manajemen adalah (1) melakukan restrukturisasi organisasi agar tidak terjadi perangkapan jabatan; (2) menyertakan daftar agunan pada laporan pembiayaan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan Rp 1.000.000; (3) memaksimalkan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan macet agar dapat tertagih (minimal sepertiga pada tahun berikutnya) dan/ atau membuat laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan biaya; (4) melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan pembiayaan yang disertai dengan dokumen pengikatan dan/ atau penyerahan agunan; dan (5) perlu adanya kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain untuk memfasilitasi pembiayaan sehingga dapat menjaga likuiditas koperasi.
4. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi biaya yang telah dilaksanakan dan menyusun manajemen strategi efisiensi biaya yang lebih baik, sehingga besarnya jumlah partisipasi bruto tidak selalu diimbangi dengan jumlah biaya operasional yang tinggi. Selain itu, manajemen juga perlu menyeimbangkan jumlah biaya gaji dan honor karyawan terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dalam arti lebih mengoptimalkan karyawannya dalam memberikan pelayanan terhadap mitra pembiayaan.
5. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana yang diterima untuk pembiayaan produktifnya melalui kebijakan pembiayaan mayoritas untuk waktu jangka pendek dan mempunyai nilai produktif, sehingga dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.
6. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus dapat mempertahankan tingkat kesehatan pada aspek jati diri yang sudah mendapatkan predikat sehat dengan terus mempromosikan ekonomi anggotanya melalui pemberian manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi terhadap total simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya, sehingga partisipasi bruto dan jumlah anggota akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.
7. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus berupaya untuk: (1) meningkatkan rentabilitas ekonominya dengan cara memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan; (2) meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan dan jasa anggota, serta menekan pengajuan pinjaman kepada pihak ketiga, sehingga dapat mengurangi biaya bunga yang dapat menyebabkan pemborosan biaya operasional; dan (3) melakukan efisiensi biaya operasional pelayanan agar dapat meningkatkan kemandirian operasional pelayanan.
8. Manajemen KSPPS BMT BUM Tegal harus dapat mempertahankan tingkat kesehatan pada aspek kepatuhan prinsip syariah yang sudah mendapatkan predikat sehat melalui: (1) penyempurnaan dari sisi SOP setiap pembiayaan, dimana setiap

akad dibuat tata langkahnya dan perlu adanya pengawas internal cabang (PIC) yang menjaga kepatuhan atas pelaksanaan SOP tersebut; (2) Penguatan kemampuan para pengelola, khususnya terkait peningkatan penguasaan ekonomi syariah yang paling dasar dan perlu program *upgrading* dari sisi ini yang terukur, dapat dievaluasi dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan (3) Meningkatkan dakwah dan pemahaman ekonomi dan transaksi syariah di tengah masyarakat, agar semangat menjalankan akad syariah bukan hanya dari pihak KSPPS BMT BUM Tegal saja, namun juga masyarakat selaku anggota.

9. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di KSPPS BMT BUM Tegal, sebaiknya melakukan kajian lebih mendalam mengenai peningkatan modal sendiri, efisiensi biaya operasional, dan peningkatan aspek kemandirian dan pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2004 tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Budiwati, N. (2009). *Manajemen keuangan dan permodalan koperasi*.
- Dewi, N. K. I. Y. (2016). Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam Mandala Amerta Sedana (KSP MAS) Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8 (3),1-10.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis laporan keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hafidz, M., Ismanto, K., & Rozi, M. (2011). Laporan penelitian manajemen risiko BMT (Studi terhadap manajemen risiko BMT-BMT di kota Pekalongan). Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Hendar, & Kusnandi. (2005). *Ekonomi koperasi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayati, N. U. & Suranta, S. (2016). Pengaruh efisiensi biaya terhadap tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) (Studi pada koperasi di Surakarta tahun 2015). *Jurnal Akuntansi*, 4 (2), 37-47.
- Joelarso. (2012). *BMT summit 2012*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan.
- Komalasari, I., Fauziah, E., & Setiyawan, S. (2015). Pengaruh penyisihan aktiva produktif (PPAP) terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di BMT Mitra kota Cimahi periode 2011-2013. *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial dan Humaniora)*, 116-123.
- Mughal, M. Z. (2014). *Empowering SMEs for financial inclusion and growth*.

- Rahayu, F. (2017). Penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri tahun 2014-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6 (4), 364-377.
- Sakti, A. (2013). Pemetaan kondisi dan potensi BMT: Kemitraan dalam rangka memperluas pasar & jangkauan pelayanan bank syariah kepada mikro. *Jurnal al-Muzara'ah*, 1 (1), 1-18.
- Sudarwanto, A. (2013). *Akuntansi koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukmana, A. A. & Mulyati, S. (2015). Penilaian kesehatan KJKS BMT Binamas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2 (2), 125-144.
- Tyas, A. R. (2014). *Analisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisati Kota Banjar Jawa Barat tahun 2011-2013*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY.
- Wardiwiyono, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5 (4), 340-352.
- Yusuf, B. (2016). Analisis tingkat kesehatan koperasi syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6 (1), 101-102.